

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FESTIVAL TELUK JAILOLO (FTJ) STUDI DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TRISNO MAIS

WILLIAM AREROS

MAXI EGETEN

ABSTRAK

Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Barat melalui Dinas Pariwisata tahun 2009 melihat penting untuk mengembangkan sektor pariwisata. Melalui kebijakan daerah, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mengagendakan event Festival Teluk Jailolo (FTJ) supaya dilaksanakan setiap tahun. Secara eksplisit, tujuan pelaksanaan Festival Teluk Jailolo (FTJ) adalah melakukan promosi wisata.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor – faktor yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Festival Teluk Jailolo (FTJ) di Kabupaten Halmahera Barat.

Penulis menilai bahwa pelaksanaan kegiatan Festival Teluk Jailolo (FTJ) telah berjalan efektif. Hal ini tentu dapat dilihat dari beberapa faktor, yang paling kelihatan ialah, dari pelaksanaan kegiatan itu, dapat mendorong sejumlah wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Halmahera Barat. Pelaksana kegiatan Festival Teluk Jailolo (FTJ) sudah berdampak positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Karena setelah kegiatan ini dilaksanakan, kunjungan wisatawan yang berkunjung di daerah– daerah wisata terus berdatangan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Festival Teluk Jailolo

ABSTRACT

The regional government of West Halmahera Regency through the Tourism Office in 2009 sees it important to develop the tourism sector. Through local policy, the government took a strategic step by scheduling the Jailolo Bay Festival (FTJ) to be held every year. Explicitly, the objective of the Jailolo Bay Festival (FTJ) is to promote tourism.

This research method uses qualitative research methods. In this study is to analyze the factors associated with the implementation of the Jailolo Bay Festival (FTJ) policy in West Halmahera Regency.

The author considers that the implementation of the Jailolo Bay Festival (FTJ) has been effective. This certainly can be seen from a number of factors, the most obvious is that, from the implementation of the activity, it can encourage a number of tourists to visit West Halmahera Regency

The organizer of the Jailolo Bay Festival (FTJ) has had a positive impact on the local government and community. Because after this activity is carried out, visiting tourists visiting tourist areas continue to arrive.

Keywords: Policy Implementation, Jailolo Bay Festival

PENDAHULUAN

Festival Teluk Jailolo (FTJ) adalah program pemerintah daerah yang bertujuan promosi potensi wisata; keindahan pantai serta kekayaan bawah laut teluk Jailolo. Oleh karena itu, indikator keberhasilan Festival Teluk Jailolo (FTJ) dapat dilihat dari seberapa banyaknya wisatawan yang berkunjung di

Kabupaten Halmahera Barat. Apabila kunjungan wisatawan meningkat, maka tentu hal itu akan berdampak pada pendapatan daerah. Dimana, pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Adapun, penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu isi kebijakan dan konteks. Namun agar dapat dipahami secara

komprehensif, maka pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan tentang apa maksud dari isi kebijakan. Dalam isi kebijakan, tentu ada beberapa sub bagian yang akan dirinci, yakni kepentingan yang dipengaruhi, manfaat apa saja yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envision*), kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*), pelaksanaan program (*program implementer*), sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*). Sementara untuk konteks kebijakan, adalah sebagai berikut: kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involed*), jenis manfaat yang dihasilkan (*type of benefist*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envision*), kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementer*), sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*).

Berdasarkan penelitian terdahulu, jurnal yang pertama menggunakan penelitian dari Veriani (2009), meneliti dengan judul “*implementasi kebijakan pengembangan kawasan wisata Kabupaten Kebumen*”, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kawasan wisata Kabupaten Kebumen dan faktor- faktor apa yang mempengaruhinya. Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kabupaten Kebumen menyimpan potensi pariwisata yang banyak, objek wisata tersebut memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan penelitian terdahulu jurnal yang kedua menggunakan, Fianda (2008), dengan judul “*implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi*”. Adapun fokus dari penelitian ini yaitu melihat implementasi dari beberapa program pengembangan wisata tersebut yakni pengembangan objek wisata, pengembangan sarana perhubungan, peningkatan

kemampuan pariwisata, peningkatan sadar wisata masyarakat, pengembangan pusat informasi pelayanan wisata, peningkatan promosi wisata dan pengembangan pusat pelayanan wisata terpadu. Dalam menganalisis penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, yaitu melihat implementasi dari beberapa program pengembangan wisata, yakni pengembangan objek wisata, pengembangan sarana perhubungan, peningkatan kemampuan pariwisata, peningkatan sadar wisata masyarakat, pengembangan pusat informasi pelayanan wisata, peningkatan promosi wisata dan pengembangan pusat pelayanan wisata terpadu.

Berdasarkan penelitian terdahulu jurnal yang ketiga menggunakan, Deni Rahayu (2001), dengan judul “*Analisis Alternatif Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Menjadi Andalan Daerah di Propinsi Jawa Barat*”. Penelitian ini mengfokuskan mengenai kurang berhasilnya atau belum mencapai optimalisasi pariwisata Jawa Barat, sehingga kunjungan wisatawan terutama dari mancanegara belum menunjukkan peningkatan yang berarti, lebih lanjut penelitian ini melihat kontribusi sektor pariwisata terhadap tingkat pendapatan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat yang belum memperlihatkan harapan yang diinginkan, seiring dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat. Penelitian ini mengfokuskan terhadap ketidak berhasilan atau dengan kata lain belum mencapai optimalisasi pariwisata Jawa Barat.

Berdasarkan penelitian terdahulu jurnal yang keempat menggunakan, Alma Pongtuluran (2011), dengan judul “*Potensi wisata selam di perairan Malalayang –Dua, Kota Manado*”. Tujuan penelitian ini untuk menginventarisasi potensi wisata selam di wilayah Malalayang –Dua, Kota Manado untuk dapat direkomendasikan sebagai objek wisata selam di Kota Manado. Penelitian kualitatif ini menggunakan observasi dan

pendapat pakar melalui wawancara. Persamaan penelitian ini keduanya menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori dalam melakukan kajian terkait dengan objek yang diteliti. Dari penelitian terdahulu ini, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian tersebut sebagai referensi dalam memperkaya karya ilmiah penulis.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Winarno (2008) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah.

Grindle (1980: 5) lebih lanjut mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks (*context of policy*).

Dimensi Implementasi Kebijakan Publik

Berikut ini definisi operasional yang menjelaskan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang akan dijadikan bahan analisis lebih mendalam:

1. Pengembangan pariwisata adalah pengembangan wisata bahari yang didasarkan pada potensi. Pengembangan pariwisata dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) serta untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

2. Implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari mengacu pada program kebijakan kepariwisataan nasional dan kebijakan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Menganalisis implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat, maka harus memperhatikan beberapa komponen penunjang, yaitu aksesibilitas, atraksi wisata, promosi wisata dan sumber daya keuangan.

Faktor keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dapat diukur dari dua pendekatan. Yakni isi kebijakan dan konteks kebijakan.

Konsep Festival Teluk Jailolo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No 2 Tahun 2012 tentang Festival Teluk Jailolo, pasal 1 poin (i) menyebutkan bahwa festival teluk jailolo yang selanjutnya disebut FTJ adalah festival teluk jailolo yang merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat setiap tahun. Selanjutnya pasal 5 yang mengatur tentang asaz penyelenggaraan festival teluk jailolo yaitu:

- a. Manfaat
- b. Kekeluargaan;
- c. Kesenambungan;
- d. Kelestarian;
- e. Partisipatif;
- f. Berkelanjutan;
- g. Persatuan dan kesatuan.

Kerangka Berfikir

Kegiatan ilmiah dilakukan dengan maksud supaya bisa mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan Festival Teluk Jailolo (FTJ). Argumntasi dasarnya ialah menilai bahwa apakah pelaksanaannya Festival Teluk Jailolo (FTJ) telah berjalan efektif, atau sebaliknya. Dalam rangka itu, penulis berpandangan bahwa teori Marille S Grindle menjadi salah satu teori yang sangat relevan untuk mengkaji

persoalan di sana. Adapun, bagi Grindle, untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik, maka dapat ditentukan oleh dua aspek, yaitu, isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks (*context of policy*) implementasinya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Moleong, (1996: 27) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai instrument yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya (alamiah).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Halmahera Barat. Peneliti mengamati bahwa implementasi kebijakan Festival Teluk Jailolo (FTJ) masih belum memberikan manfaat terhadap masyarakat maupun daerah.

Informan dalam penelitian ini diambil meliputi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekretariat DPRD Halmahera Barat (Halbar), dan pihak swasta serta beberapa masyarakat. Jumlah informan disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Sesuai dengan masalah yang telah disebutkan di atas, maka fokus penelitian ini ditekankan pada Implementasi Kebijakan Festival Teluk Jailolo (FTJ) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Hal ini akan terlihat jika menggunakan dua hal yang dikemukakan Marille S Grindle (Mulyadi, 2015: 66), lebih lanjut mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks (*context of policy*) implementasinya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dapat dalam berbagai bentuk yaitu melalui, observasi, wawancara,

data primer dan sekunder, serta studi dokumen.

Informan penelitian ini sebagai berikut:

1. A R Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Barat;
2. D S Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Halmahera Barat;
3. C A Kepala Bada Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
4. F A Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
5. N R A Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
6. J U Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat;
7. Y B Masyarakat Desa Akelamo Kecamatan Sahu;
8. M M pelaku usaha dari Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;
9. O G pelaku usaha dari Desa Buo Kecamatan Loloda;
10. L L Masyarakat Desa Gamici, Kecamatan Jailolo;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak Geografis dan Administratif.

Halmahera Barat adalah Kabupaten Maluku Utara (Kabupaten Induk) yang berubah nama setelah terjadi pemekaran berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2003 dan terletak di Pulau Halmahera. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 14.823,16 km² dengan luas daratan 3.199,74 km² dan laut seluas 11.623,42 km², ini terletak antara 1°.48' lintang utara sampai 0°.48' lintang utara, serta 127°16.0" bujur timur sampai 127.16" bujur timur.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengukur keberhasilan implementasi kebijakan Festival Teluk Jailolo (FTJ) dengan teori Grindle, di mana Grindle meyebut bahwa ada dua hal prinsip yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yakni isi kebijakan (*content of policy*), dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Pada bagian ini,

penulis akan lebih dulu memaparkan tentang isi kebijakan (content of policy) yang mempengaruhi implementasi kebijakan Festival Teluk Jailolo (FTJ) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yaitu mengenai kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan (interest affected).

Pembahasan

Sebagaimana amanat Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2012 tentang Festival Teluk Jailolo (FTJ). Di situ disebutkan bahwa ada beberapa tujuan dari kegiatan tersebut, yakni, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memupuk persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, mewujudkan ketahanan budaya dan citra pariwisata, meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata, mengembangkan pariwisata yang berbasis kemasayarakatan (*community base torist*), mempromosikan, memperkenalkan, melestarikan mutu, obyek dan daya tarik wisata.

Kewajiban pemerintah daerah adalah untuk membina dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap terlaksananya kegiatan Festival Teluk Jailolo (FTJ). Selain itu, pemerintah kabupaten diberikan kewenangan untuk menetapkan berbagai aturan teknis bagi terselenggaranya kegiatan ini setiap tahun. Dari tujuan yang telah disebutkan di atas, maka peneliti beranggapan bahwa, supaya tujuan yang telah disebutkan di atas dapat direalisasikan, maka pemerintah perlu melakukan berbagai upaya pembenahan. Satu misalnya dengan melakukan perbaikan – perbaikan pada beberapa sarana penunjang pariwisata. Sebab infrastruktur itu sangat berpengaruh terhadap investasi di sektor pariwisata.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), diukur melalui 6 poin (content of policy) yang mempengaruhi kebijakan Festival Teluk Jailolo (FTJ) di Halmahera Barat (Halbar).

Isi Kebijakan

Kepentingan yang terpengaruh; setiap kebijakan tentu sangat mempengaruhi beberapa kepentingan. Dalam hal ini, ada beberapa kepentingan yang terpengaruh, yakni petani, pengusaha. Ketika kebijakan ini berjalan efektif, maka petani, pengusaha dan pemerintah daerah terlebih khusus akan mendapatkan manfaatnya. Jadi, pada poin ini, tentu ada banyak kepentingan yang berkaitan. Oleh sebab itu, ke depan pemerintah perlu lebih mengseriusi setiap problem di Kabupaten Halmahera Barta, terutama pada sektor pariwisata.

Jenis manfaat yang dihasilkan dan derajat perubahan yang diinginkan; tentu kegiatan Festival Teluk Jailolo (FTJ) diharapkan mampu memberi manfaat terhadap para kelompok – kelompok kepentingan: masyarakat, swasta dan pemerintah daerah. Manfaat yang diharapkan dari adanya kegiatan ini, tentu pertumbuhan ekonomi kian melesit. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Kemudian bagi pihak swasta, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kunjungan para wisatawan akan semakin bertambah melakukan kunjungan di Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka kunjungan wisatawan. Hal itu bukan tanpa maksud, karena apabila ada ketambahan kunjungan wisatawan, tentunya jumlah pengunjung hotel dan tempat – tempat makan ikut meningkat. Ketika ada peningkatan, pajak dan retribusi yang dibebankan pemerintah terhadap pihak swasta bakal ikut bertambah. Apabilah bertambah, bukan tidak mungkin, sektor pariwisata mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan

retribusi. Dilihat dari manfaat, peneliti beranggapan bahwa implementasi program berjalan dengan baik dan sesuai amanah Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2012 Tentang Festival Teluk Jailolo (FTJ).

Kedudukan pembuat kebijakan; pengambilan keputusan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bupati yang notabahnya mengambil peran eksekutif di daerah.

Pelaksana program; Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelaksana program. Dalam konteks ini, dinas terkait didapati tidak mampu secara mandiri. Akibatnya, dalam setiap pelaksanaan, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilibatkannya. Efeknya, ada sejumlah pelayanan publik di beberapa SKPD ikut tidak terlayani.

Sumber - sumber daya yang digunakan; dalam Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Festival Teluk Jailolo (FTJ), mengatur tentang sumber keuangan. Yakni, terkait pendanaan pelaksanaan Festival Teluk Jailolo (FTJ) dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), dan pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Fasilitas yang digunakan saat pelaksanaan Festival Teluk Jailolo (FTJ) berlangsung dan sumber daya manusia meliputi tenaga pelaksana teknis, pengawas, fasilitas serta sarana dan prasarana, serta masyarakat dan potensi kekayaan alam.

Konteks Implementasi

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; kekuasaan ini dititik beratkan pada kekuasaan kepala daerah (bupati). Namun dalam praktiknya, terkadang terjadi pro dan kontra. Di sisi lain, ada sejumlah wakil rakyat yang melakukan protes atas kegiatan ini, sehingga dimintai untuk menghentikan event ini, dan di lain pihak, pihak swasta mendorong agar kegiatan ini terus dilakukan supaya mampu mendatangkan sejumlah wisatawan.

Karakteristik lembaga; secara keseluruhan menjadi tanggung jawab kepala daerah

(bupati), jadi sewaktu – waktu pelaksanaan kegiatan ini bisa menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat, dan atas pertimbangan kepala daerah pula, kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi.

Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana; dalam program Festival Teluk Jailolo (FTJ) di Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tingkat kepatuhan sudah cukup baik. Jika diukur berdasarkan faktor ini maka Implementasi berjalan cukup baik.

Saran

1. Fasilitas di setiap objek wisata harus ditingkatkan. Jika ada objek wisata yang fasilitasnya belum memadai, maka pemerintah daerah harus sesegara melakukan pembenahan serta perbaikan – perbaikan. Selain itu, fasilitas jalan juga perlu diperhatikan. Sebab, ada sejumlah daerah yang memiliki objek wisata potensial dikunjungi wisatawan, namun fasilitas jalan masih belum ada. Usaha wisata seperti hotel dan rumah – rumah makan harus terus didorong. Sebab didapati bahwa usaha wisata belum merata.
2. Kedepan harusnya ada gagasan – gagasan segar yang lahir dari pikiran para pemangku kebijakan. Artinya, sektor pariwisata perlu didesain kembali. Apabila selama ini tidak didesain secara kontekstual, maka berikutnya perlu pariwisata lebih mengedepankan aspek sosiologis.
3. Kegiatan Festival Teluk Jailolo (FTJ) untuk aspek budaya lokal perlu lebih didorong.
4. Membuat pelatihan bagi pemandu wisata, dan itu harus dikelola oleh pemerintah daerah.
5. Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam mempromosikan potensi wisata.
6. Harus dibuatkan regulasi atas pengelolaan daerah wisata oleh masyarakat setempat.

7. Pemerintah perlu mendorong dan berani membuka peluang bagi investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata

DAFTAR PUSTAKA

- Areros A William,. 2013. *Implementasi kebijakan pelayanan perizinan*. Yayasan Serat Manado.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Publik Policy*. New Jersey: Englewood Cliffss
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1978.
- Dunn N. William,.2013 *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah mada university prees.
- Edwards III dan G. C., 1980. *Implementing Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Fischer Frank, Miller G., Sidney. S Mara,., *Handbook Analisis Kebijakan Publik* Bandung 2015
- Grindle, Merille . S (ed). 1980. *Politics and Policy Implementation and Public Policy in the trird Word*. New Jersey: Princenton University Press.s
- Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip – prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Jakarta PT. Rajagrafindo Persada.
- Loekman, Soetrisno. 1988. *Negara dan Peranannya dalam Menciptakan Pembangunan Desa yang Mandiri*. Dalam majalah Prisma No 1. Lp3es. Jakarta : PT. Budi Aksara.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, C. V. ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, 1996, *Meteorodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Miles, M.B., and A. M. Huberman (1992). *Qualitative Data Analysis: A sourcebook of New Methods* (2nd ed.). Newbury Park,CA: Sage.
- Mulyadi Deddy. *Study Kebijakan Publik dan pelayanan Publik*. ALFABETA 2015.
- Mustopadidjaja. 1988. *Manajemen Pembangunan Nasional Kebijakan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta: LANRI.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi, Beberapa Konstruksi Utama*, Tangerang: Cirao Credentia Centre.
- Nugroho, Riant, D 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho Riant. *Kebijakan publik di negara-negara berkemban*. Pustaka pelajar 2015.
- Siagian, Sondang P. 1985. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Surbasono AG. *Analisi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar 2015.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress, 2008.
- Widodo, Joki. 2001. *Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi*, Surabaya: Insan Cendekia
- Samodra. 1994. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisa*, Jakarta: Intermedia.

Dokumen :

Perda Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Festival Teluk
Jailolo Kab Halbar.

Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisata (Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
4966).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisata Nasional.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata No.
KM.67/UM.001/MPK/2004

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.